

PEMBINAAN SISTEM AKREDITASI NASIONAL OLEH KEPALA SEKOLAH DALAM MEWUJUDKAN SEKOLAH UNGGUL: STUDI KASUS DI SD NEGERI 174554 LUMBAN HARIARA

Peni Falentina Sibarani¹, Nuraini Lumbantobing², Andar Gunawan Pasaribu³

Institut Agama Kristen Negeri Tarutung^{1,2,3}

penifalentin@gmail.com¹, nuraini.jefainy@gmail.com², andargunawanpasaribu@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembinaan sistem akreditasi nasional yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam mewujudkan sekolah unggul di SD Negeri 174554 Lumban Hariara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Subjek penelitian terdiri atas kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah berperan strategis dalam pembinaan sistem akreditasi melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Strategi pembinaan meliputi supervisi akademik, pembinaan administrasi, penguatan budaya mutu, serta peningkatan kompetensi guru. Faktor pendukung utama meliputi komitmen warga sekolah dan dukungan komite, sedangkan kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sarana, waktu, serta beban administrasi. Melalui pembinaan yang sistematis dan kolaboratif, SD Negeri 174554 Lumban Hariara berhasil mempertahankan status sekolah unggul dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci: Pembinaan, Akreditasi Nasional, Kepala Sekolah, Sekolah Unggul, Studi Kasus.

ABSTRACT

This study aims to analyze the principal's implementation of the national accreditation system in realizing a superior school at SD Negeri 174554 Lumban Hariara. This study used a qualitative approach with a case study approach. The research subjects consisted of the principal, teachers, education staff, and the school committee. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation studies. The results indicate that the principal plays a strategic role in fostering the accreditation system through planning, implementation, evaluation, and follow-up. Fostering strategies include academic supervision, administrative development, strengthening a culture of quality, and improving teacher competency. Key supporting factors include the commitment of the school community and the support of the committee, while challenges include limited facilities, time, and administrative burden. Through systematic and collaborative development, SD Negeri 174554 Lumban

Hariara has successfully maintained its status as a superior school and increased community trust..

Keywords: *Development, National Accreditation, Principal, Superior School, Case Study.*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan dasar memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk fondasi mutu sumber daya manusia bangsa. Salah satu instrumen penting dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia adalah akreditasi sekolah, yang menjadi bentuk penjaminan mutu eksternal terhadap satuan pendidikan berdasarkan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Melalui proses akreditasi, sekolah tidak hanya dinilai dari sisi administratif, tetapi juga dari kualitas penyelenggaraan pendidikan, tata kelola, dan pencapaian pembelajaran (Kemendikbudristek, 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa akreditasi sekolah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan mutu satuan pendidikan. Penelitian oleh Arifin & Rukmini (2021) menunjukkan bahwa implementasi akreditasi mendorong sekolah dasar meningkatkan budaya kerja dan profesionalisme guru. Demikian pula, Sari (2022) menemukan bahwa sekolah yang memiliki peringkat akreditasi lebih tinggi cenderung menunjukkan hasil belajar siswa yang lebih baik dan tata kelola yang lebih tertib. Studi lain oleh Lestari (2023) di Jawa Tengah mengungkapkan bahwa keberhasilan akreditasi tidak terlepas dari kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, supervisi akademik yang terencana, dan dukungan warga sekolah yang konsisten.

Kepala sekolah memegang peranan sentral dalam proses akreditasi. Menurut Mulyasa (2019), kepala sekolah berfungsi sebagai pemimpin pendidikan yang berperan sebagai edukator, manajer, supervisor, inovator, dan motivator. Kepemimpinan kepala sekolah yang visioner dan kolaboratif terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan dan pencapaian status akreditasi sekolah (Wahjosumidjo, 2013). Penelitian Tanjung dan Lumbantoruan (2022) di Sumatera Utara menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan kepala sekolah melalui pendekatan partisipatif mampu meningkatkan kesiapan sekolah menghadapi akreditasi serta memperkuat budaya mutu di kalangan guru.

Namun, pelaksanaan akreditasi di berbagai satuan pendidikan dasar tidak selalu berjalan optimal. Beberapa kendala umum yang ditemukan antara lain keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta kurangnya pelatihan terkait pemahaman instrumen akreditasi

(Situmorang, 2020). Selain itu, dinamika perubahan kebijakan dan sistem akreditasi nasional memerlukan adaptasi dan pembinaan yang berkelanjutan dari kepala sekolah agar sekolah tetap selaras dengan tuntutan mutu pendidikan nasional.

Dalam konteks ini, pembinaan sistem akreditasi nasional oleh kepala sekolah menjadi isu penting yang perlu dikaji lebih mendalam. Pembinaan tidak hanya mencakup pengawasan administratif, tetapi juga proses peningkatan kapasitas guru, optimalisasi sumber daya, dan penciptaan budaya mutu di lingkungan sekolah. Sejalan dengan hal tersebut, studi Herlina & Susanto (2023) menegaskan bahwa pembinaan berkelanjutan oleh kepala sekolah mampu menumbuhkan kesadaran mutu dan meningkatkan akuntabilitas kinerja satuan pendidikan.

Pemilihan SD Negeri 174554 Lumban Hariara sebagai lokasi penelitian didasarkan pada statusnya yang belum unggul namun berkomitmen menjadi sekolah unggul di Kabupaten Toba. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, Sekolah ini telah menunjukkan kemajuan dalam pemenuhan standar akreditasi nasional, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sarana, kebutuhan peningkatan kompetensi guru, serta konsistensi pelaksanaan supervisi dan evaluasi mutu. Kondisi ini menjadikan sekolah tersebut menarik untuk dikaji sebagai studi kasus mengenai bagaimana kepala sekolah melakukan pembinaan sistem akreditasi nasional untuk mewujudkan sekolah unggul.

Pentingnya pendekatan studi kasus dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk memahami fenomena pembinaan secara mendalam dalam konteks alami dan spesifik. Menurut Yin (2018), studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara rinci bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi, dengan mempertimbangkan konteks sosial, organisasi, dan budaya yang melingkupinya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik pembinaan, tetapi juga menganalisis strategi, tantangan, dan implikasi kepemimpinan kepala sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan dasar.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis, yaitu memperkaya literatur mengenai manajemen mutu dan akreditasi di sekolah dasar; kontribusi praktis, yaitu memberikan model pembinaan yang dapat diadaptasi oleh kepala sekolah lain dalam meningkatkan akreditasi; serta kontribusi kebijakan, yakni memberikan masukan bagi Dinas Pendidikan dalam mengembangkan program pembinaan dan pendampingan akreditasi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan utama: *Bagaimana kepala sekolah melaksanakan pembinaan sistem akreditasi nasional dalam mewujudkan sekolah unggul di SD Negeri 174554 Lumban Hariara? serta faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat proses tersebut.*

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena pembinaan sistem akreditasi secara mendalam dalam konteks alamiah di SD Negeri 174554 Lumban Hariara.

Subjek penelitian terdiri atas kepala sekolah, Delapan orang guru, satu tenaga kependidikan, dan ketua komite sekolah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Wawancara mendalam untuk menggali persepsi dan pengalaman partisipan;
2. Observasi partisipatif terhadap kegiatan pembinaan dan supervisi;
3. Dokumentasi terhadap dokumen akreditasi, program kerja, dan hasil evaluasi mutu.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Bentuk Pembinaan Kepala Sekolah dalam Sistem Akreditasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah SD Negeri 174554 Lumban Hariara melaksanakan pembinaan sistem akreditasi nasional melalui empat tahap utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Keempat tahap ini mencerminkan proses manajerial yang sistematis dan berkelanjutan dalam membangun budaya mutu sekolah.

Pada tahap perencanaan, kepala sekolah menyusun rencana strategis (Renstra) dan program kerja tahunan yang mengacu pada delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Perencanaan dilakukan secara kolaboratif melalui rapat kerja sekolah dan tim penjaminan mutu internal. Langkah ini sesuai dengan pandangan Mulyasa (2019) bahwa perencanaan

partisipatif mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap mutu pendidikan.

Pada tahap pelaksanaan, kepala sekolah menjalankan kegiatan pembinaan dengan menekankan supervisi akademik, pelatihan internal, dan monitoring rutin terhadap kinerja guru. Supervisi dilaksanakan tidak hanya sebagai kontrol administratif, tetapi juga sebagai proses pendampingan profesional. Kepala sekolah secara aktif memfasilitasi kegiatan pelatihan terkait pemenuhan indikator akreditasi, penyusunan dokumen mutu, dan peningkatan kualitas pembelajaran. Hal ini sejalan dengan penelitian Tanjung dan Lumbantoruan (2022) yang menyatakan bahwa supervisi yang bersifat dialogis dan konstruktif dapat meningkatkan komitmen guru terhadap standar mutu sekolah.

Tahap evaluasi dilakukan secara periodik menggunakan instrumen akreditasi untuk menilai tingkat ketercapaian setiap komponen SNP. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar refleksi bersama dalam rapat mutu sekolah. Kepala sekolah mendorong tim mutu untuk melakukan *self-assessment* terhadap kinerja lembaga, sebagaimana disarankan oleh Kemendikbudristek (2021) dalam sistem penjaminan mutu internal (SPMI).

Tahap terakhir, yaitu tindak lanjut (*continuous improvement*), diwujudkan melalui perbaikan berkelanjutan terhadap kelemahan yang ditemukan dalam evaluasi. Kepala sekolah menindaklanjuti temuan dengan penyesuaian program, peningkatan kapasitas guru, dan perbaikan dokumen mutu. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Plan-Do-Check-Act (PDCA) dalam *Total Quality Management (TQM)*, yang menekankan pentingnya siklus perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan mutu pendidikan (Deming, 1986).

Dengan demikian, pola pembinaan kepala sekolah di SD Negeri 174554 Lumban Hariara menunjukkan bahwa kepemimpinan yang sistematis, kolaboratif, dan berbasis mutu merupakan faktor utama dalam menjaga keberlanjutan pencapaian akreditasi.

2) Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan

Proses pembinaan sistem akreditasi nasional di sekolah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat.

Faktor pendukung yang ditemukan dalam penelitian meliputi:

1. Kepemimpinan kepala sekolah yang visioner dan terbuka, yang mampu menggerakkan seluruh warga sekolah untuk berorientasi pada mutu. Kepala

sekolah berperan sebagai *motivator* dan *role model* bagi guru dan tenaga kependidikan.

2. Kerjasama dan komitmen guru, yang ditunjukkan melalui keterlibatan aktif dalam tim akreditasi, pengumpulan dokumen, dan pelaksanaan evaluasi diri sekolah.
3. Dukungan komite sekolah dan partisipasi orang tua, yang memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pemenuhan sarana prasarana dan kegiatan peningkatan mutu.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Herlina dan Susanto (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan pembinaan mutu pendidikan sangat ditentukan oleh kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan masyarakat. Kepemimpinan partisipatif mampu membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya mutu sekolah.

Adapun faktor penghambat yang teridentifikasi meliputi:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, seperti ruang laboratorium dan perangkat teknologi informasi.
2. Beban administratif guru yang tinggi, sehingga mengurangi fokus terhadap peningkatan profesionalisme dan inovasi pembelajaran.
3. Minimnya pelatihan lanjutan terkait pembaruan instrumen akreditasi nasional dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M).

Faktor penghambat ini senada dengan temuan Situmorang (2020) yang menjelaskan bahwa lemahnya dukungan sumber daya dan kurangnya pelatihan sering menjadi kendala utama dalam pelaksanaan akreditasi di sekolah dasar. Oleh karena itu, upaya kepala sekolah dalam mengoptimalkan sumber daya internal menjadi sangat penting untuk menjaga konsistensi peningkatan mutu.

3) Dampak Pembinaan terhadap Terwujudnya Sekolah Unggul

Pembinaan sistem akreditasi yang dilakukan kepala sekolah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan mutu sekolah. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dampak tersebut meliputi beberapa aspek utama:

1. Peningkatan Kesiapan Sekolah dalam Visitasi Akreditasi

Sekolah menjadi lebih siap menghadapi visitasi BAN-S/M karena seluruh perangkat administrasi, instrumen mutu, dan dokumen pendukung telah tersusun dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran mutu di kalangan warga sekolah.

2. Tumbuhnya Budaya Mutu Sekolah

Melalui pembinaan yang berkesinambungan, tumbuh budaya kerja yang berorientasi pada mutu (*quality culture*). Guru lebih aktif melakukan refleksi diri, inovasi pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar secara berkelanjutan.

3. Peningkatan Kinerja Guru dan Keterlibatan Masyarakat

Supervisi rutin dan pelatihan internal meningkatkan kompetensi pedagogik serta motivasi guru. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dan komite sekolah semakin kuat dalam mendukung program mutu.

4. Peningkatan Prestasi Akademik dan Non-Akademik Siswa

Mutu proses pembelajaran yang membaik berdampak pada peningkatan prestasi siswa, baik dalam kompetisi akademik maupun kegiatan ekstrakurikuler.

Temuan ini memperkuat teori Wahjosumidjo (2013) dan Mulyasa (2019) bahwa kepemimpinan kepala sekolah yang efektif merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi sistem akreditasi dan peningkatan mutu sekolah. Pendekatan pembinaan yang dilakukan kepala sekolah SD Negeri 174554 Lumban Hariara juga mencerminkan prinsip manajemen mutu terpadu (Total Quality Management/TQM), yang menekankan partisipasi seluruh anggota organisasi dalam mencapai keunggulan berkelanjutan.

Selain itu, keberhasilan pembinaan ini menunjukkan bahwa pembinaan akreditasi tidak sekadar memenuhi indikator administratif, tetapi juga menjadi sarana transformasi budaya organisasi sekolah menuju sekolah unggul. Menurut Sari (2022), sekolah unggul bukan hanya berprestasi akademik tinggi, tetapi juga memiliki tata kelola yang baik, lingkungan belajar yang kondusif, serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

Dengan demikian, pembinaan sistem akreditasi oleh kepala sekolah di SD Negeri 174554 Lumban Hariara dapat dikategorikan berhasil dalam menciptakan iklim sekolah yang unggul dan berdaya saing. Meskipun terdapat sejumlah kendala teknis dan administratif, komitmen kepemimpinan yang kuat dan partisipasi warga sekolah menjadi fondasi utama keberlanjutan mutu pendidikan di sekolah ini.

D. KESIMPULAN

Kepala sekolah di SD Negeri 174554 Lumban Hariara telah melaksanakan pembinaan sistem akreditasi nasional secara terencana, terukur, dan kolaboratif. Pembinaan mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut yang berorientasi pada mutu. Melalui strategi tersebut, sekolah mampu mempertahankan status sebagai sekolah unggul. Kendala utama seperti keterbatasan fasilitas dan beban administrasi dapat diatasi melalui kolaborasi, inovasi, dan penguatan budaya mutu. Ke depan, pelatihan berkelanjutan dan digitalisasi dokumen akreditasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan kepala sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M., & Rukmini, D. (2021). *Implementasi Sistem Akreditasi Sekolah Dasar dan Pengaruhnya terhadap Mutu Pendidikan*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 9(2), 115–126.
- Deming, W. E. (1986). *Out of the Crisis*. Cambridge: MIT Press.
- Herlina, S., & Susanto, R. (2023). *Peran Kepala Sekolah dalam Pembinaan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar*. Jurnal Manajemen Pendidikan, 14(1), 45–58.
- Kemendikbudristek. (2021). *Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sistem Akreditasi Pendidikan*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Lestari, W. (2023). *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Akreditasi Sekolah Dasar*. Jurnal Kependidikan Indonesia, 7(3), 203–215.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications.
- Mulyasa, E. (2019). *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*. Jakarta: Grasindo.

- Sari, N. (2022). *Hubungan Akreditasi dan Mutu Pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri*. Jurnal Evaluasi Pendidikan, 6(1), 34–42.
- Situmorang, L. (2020). *Kendala Implementasi Akreditasi Sekolah di Tingkat Dasar*. Jurnal Penjaminan Mutu, 8(1), 56–70.
- Tanjung, R., & Lumbantoruan, J. (2022). *Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Pembinaan Akreditasi di Sumatera Utara*. Jurnal Pendidikan Dasar, 10(2), 101–112.
- Wahjosumidjo. (2013). *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoretik dan Permasalahannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.